

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Pemerintah Kota Banjarbaru dapat menyelesaikan penyusunan **Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2020** sebagai arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sebagai penjabaran dari aspirasi masyarakat Kota Banjarbaru guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

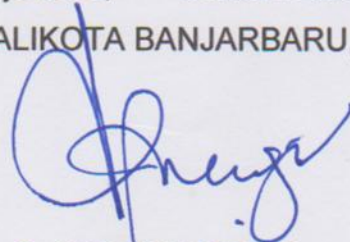
Perjanjian Kinerja ini dibuat sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru dalam upaya meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, yang di dalamnya berisi informasi Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil utama dan kondisi seharusnya.

Akhir kata, semoga Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2020 ini bermanfaat baik sebagai tolak ukur, dan bahan masukan bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Atas dukungan dan kerjasama yang berkelanjutan dari semua pihak kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Banjarbaru, Januari 2020

WALIKOTA BANJARBARU,



H. NADJMI ADHANI



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. NADJMI ADHANI

Jabatan : Walikota Banjarbaru

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Banjarbaru, Januari 2020  
WALIKOTA BANJARBARU,

H. NADJMI ADHANI



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**KOTA BANJARBARU**

VISI  
"TERWUJUDNYA BANJARBARU SEBAGAI KOTA PELAYANAN YANG BERKARAKTER

NO	MISI	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
I	Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia	1.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	10,80 Tahun
				Angka harapan lama sekolah	14,85 Tahun
		2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	99 Angka
				Angka Kematian Bayi (AKB)	5,30 Angka
II	Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas dan berwawasan lingkungan	3.	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas antar pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah Kota	99,09%
		4.	Meningkatnya penanganan kawasan rawan banjir	Persentase berkurangnya kawasan rawan banjir	10,00 %
		5.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar permukiman	Persentase kawasan perkotaan bebas kumuh	99,44%
				Prosentase rumah layak huni	99,68%
		6.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,11 Indeks
		7.	Meningkatnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	10,28%
		III	Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan	8.	Meningkatnya kegiatan ekonomi daerah (PDRB)
Jumlah kunjungan wisatawan	98.400 orang				



	prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan			Tingkat pengangguran terbuka	6,05%
		9.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp. Milyar)	223,7%
		10.	Meningkatnya investasi	Nilai Investasi PMA dan PMDN (Rp. Milyar)	2.453,6 Milyar
		11.	Meningkatnya sarana dan prasarana perekonomian	Persentase pasar tradisional yang dikelola secara modern	60,00%
		12.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Ketersediaan pangan daerah	85,00 skor PPH
IV	Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi	13.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Nilai BB
				Nilai LPPD	Nilai Tinggi
				Opini BPK	Opini WTP
				Nilai Maturitas SPIP	Nilai 3,15
		14.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mutu Sangat baik
	15.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan, akses dan kualitas layanan informasi publik dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks SPBE	2,50%	
V	Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib	16.	Meningkatnya keamanan, kesadaran hukum dan ketertiban masyarakat	Persentase penyelesaian pelanggaran Perda/Perkada	90,00%
				Jumlah kasus konflik	0 kasus
		17.	Meningkatnya pelaksanaan penanggulangan bencana	Cakupan pelaksanaan penanggulangan bencana dan tanggap darurat	92,00%

		18.	Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan penanganan penduduk miskin berdasarkan data terpadu	Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	64,00%
				Cakupan masyarakat miskin yang ditangani berdasarkan data terpadu	60,03%

	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>
1.	Pendidikan anak usia dini	Rp. 1.715.767.750
2.	Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Rp. 46.600.170.886
3.	Pendidikan Non Formal	Rp. 3.712.733.500
4.	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Rp. 1.106.624.000
5.	Pembangunan jalan dan jembatan	Rp. 29.658.884.777
6.	Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Rp. 6.372.856.000
7.	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	Rp. 4.443.780.750
8.	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Rp. 1.775.086.800
9.	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Rp. 10.574.519.500
10.	Program pengembangan destinasi pariwisata	Rp. 2.536.736.000
11.	Pengembangan pemasaran pariwisata	Rp. 684.240.000
12.	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Rp. 385.403.500
13.	Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Rp. 239.644.000
14.	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Rp. 279.775.000
15.	Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Rp. 131.450.000
16.	Peningkatan dan pengelolaan pasar	Rp. 4.316.970.250
17.	Peningkatan kinerja administratif pembangunan daerah	Rp. 404.533.950
18.	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp. 9.306.359.400



19.	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp. 3.605.578.150
20.	Layanan peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pemanfaatan TIK	Rp. 6.777.369.950
21.	Layanan penyediaan informasi publik pemerintah daerah	Rp. 459.038.000
22.	Layanan penyelenggaraan komunikasi publik pemerintah daerah	Rp. 597.927.000
23.	Layanan peningkatan kualitas layanan publik pemerintah daerah melalui pemanfaatan TIK	Rp. 211.302.000
24.	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp. 103.179.000
25.	Pengembangan wawasan kebangsaan	Rp. 256.221.250
26.	Pendidikan politik masyarakat	Rp. 285.193.050
27.	Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Walikota	Rp. 330.567.000
28.	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Rp. 490.728.500
29.	Penanganan tanggap darurat bencana	Rp. 562.939.500
30.	Pasca bencana	Rp. 79.068.200
31.	Pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Rp. 909.857.500
32.	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Rp. 337.437.220
33.	Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Narapidana, PSK , Narkoba, Dan Penyakit Sosial Lainnya)	Rp. 295.338.000
34.	Perlindungan sosial	Rp. 380.395.500

Banjarbaru, 20 Januari 2020

**WALIKOTA BANJARBARU,**

**H. NADJMI ADHANI**